



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : BADAN PANGAN NASIONAL

UNIT KERJA : DEPUTI PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ANDRIKO NOTO SUSANTO**
2. Jabatan : **DEPUTI**
3. NHK : **218846**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 6.112.500.000**

1. Tanah Seluas 2.390 m2 di KAB / KOTA LAMONGAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.434.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 615 m2/400 m2 di KAB / KOTA LAMONGAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.476.500.000
3. Tanah Seluas 1.760 m2 di KAB / KOTA LAMONGAN, HASIL SENDIRI Rp. 352.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 950 m2/300 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 2.850.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 149.000.000**

1. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
2. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 16.000.000
3. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
4. MOTOR, SUZUKI RS 250 Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 58.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 55.000.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp. ----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 700.002.500**

F. HARTA LAINNYA **Rp. ----**



Sub Total	Rp.	7.016.502.500
III. HUTANG	Rp.	502.831.460
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	6.513.671.040

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.